

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
DAN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

**(SKRIPSI)**

**Oleh  
SYAHADAT MUHAMMAD FAKHRY**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI  
2017**

## **ABSTRACT**

### **The Effect of Governmental Finance Performance on Capital Expenditure Budgeting in City and District Governments in Lampung Province**

**by  
Syahadat Muhammad Fakhry**

The purpose of this study is to prove empirically about the influence of governmental finance performance on the level of capital expenditure budgeting. Finance performance measurement uses four indicators, namely dependency level, regional revenue effectiveness, surplus of revenues and expenditures level, and fiscal area ratio. After performing multiple regression analysis with fixed effect model on panel data set for 15 city and district governments in Lampung Province during 2011 — 2015, the result showed that the variable of surplus of revenues and expenditures level have a positive effect to the level of capital expenditure budgeting. The dependency level variable is negatively affected. Meanwhile, regional revenue effectiveness and fiscal area ratio variables do not affect the level of capital expenditure budgeting.

**Keyword :** finance performance, capital expenditure, dependency level, regional autonomy, decentralization

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung**

**Oleh  
Syahadat Muhammad Fakhry**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan empat indikator, yakni tingkat ketergantungan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal. Setelah melakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode *fixed effect model* (FEM) terhadap data panel dari 14 kabupaten/kota dalam periode 2011 — 2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tingkat pembiayaan SILPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Variabel tingkat ketergantungan daerah berpengaruh secara negatif. Sementara itu, variabel efektivitas PAD dan rasio ruang fiskal tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Belanja Modal, APBD, PAD  
SILPA, Ruang Fiskal, Otonomi Daerah, Desentralisasi

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
DAN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh  
SYAHADAT MUHAMMAD FAKHRY  
NPM 1511031156**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA EKONOMI**

**Pada  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI  
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA KEUANGAN  
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI  
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Syahadat Muhammad Fakhry*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1511031156

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 197008011995122001



**Komaruddin, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 195708151995121001

2. Ketua Jurusan Akuntansi



**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 196206121990102001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**



Sekretaris : **Komaruddin, S.E., M.Si., Akt.**



Penguji Utama : **Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., C.A., CPA.**



2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 196109041987031011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 September 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2017  
Penulis,



Syahadat Muhammad Fakhry  
NPM 1511031156

## RIWAYAT HIDUP



Syahadat Muhammad Fakhry, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1990 dari pasangan Bapak Nasrur, S.E., dan Ibu Dra. Ade Irena, merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Islam Triana Bekasi, pada tahun 1996. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD Negeri Padurenan 6, Bekasi dan lulus pada tahun 2002. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Al Muslim Tambun yang diselesaikan pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Islam Al Azhar 4 Kemang Pratama hingga lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis merintis karir sebagai auditor pelaksana di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project* (STAR) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB).



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan guna perbaikan di masa depan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Syahadat Muhammad Fakhry

## SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk-Nya lah skripsi berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., sebagai Dosen Pembimbing I.  
Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi

3. Bapak Komaruddin, S.E., M.Si., Akt., sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi
4. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., C.A., C.P.A., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan guna penyempurnaan skripsi.
5. Ibu Agustina Awan, Bapak Noveriadi, Bapak Sulaiman, Bapak Yogi, beserta seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan.
7. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch II Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung,      Oktober 2017

Penulis,

Syahadat Muhammad Fakhry

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRACT .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
SANWACANA .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.6. Batasan Penelitian .....	7
1.7. Sistematika Penulisan .....	7
II. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	9
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah .....	9
2.1.1.1 Rasio Kemandirian .....	11
2.1.1.2 Rasio Ketergantungan .....	11
2.1.1.3 Rasio Efektivitas PAD .....	11
2.1.1.4 Rasio Efisiensi .....	12
2.1.1.5 Rasio Kontribusi BUMD .....	13
2.1.1.6 <i>Debts Service Coverage Ratio</i> .....	13
2.1.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) .....	14
2.1.1.8 Ruang Fiskal .....	14
2.1.2 Belanja Modal .....	15
2.1.3 Teori Keagenan .....	16
2.1.4 Teori Penganggaran .....	17
2.2 Penelitian Terdahulu .....	18
2.3 Kerangka Pemikiran .....	21
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	22
III. METODE PENELITIAN .....	26
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	26

3.3	Sampel Penelitian .....	27
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	27
3.4.1	Alokasi Belanja Modal .....	27
3.4.2	Tingkat Ketergantungan Daerah .....	28
3.4.3	Efektivitas PAD .....	28
3.4.4	Tingkat Pembiayaan SILPA .....	29
3.4.5	Rasio Ruang Fiskal .....	29
3.5	Model Penelitian .....	30
3.6	Pengujian Persyaratan Pengolahan Data .....	30
3.6.1	Pemilihan Model Regresi .....	30
3.6.1.1	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i> .....	30
3.6.1.2	<i>Fixed Effect Model</i> .....	31
3.6.1.3	<i>Random Effect Model</i> .....	31
3.6.1.4	<i>Chow Test</i> .....	31
3.6.1.5	<i>Hausman Test</i> .....	32
3.6.1.6	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> .....	32
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	32
3.6.2.1	Uji Normalitas .....	32
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas .....	33
3.6.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	34
3.6.2.4	Uji Autokorelasi .....	35
3.6.3	Pengujian Hipotesis .....	35
3.6.3.1	Analisis Regresi .....	35
3.6.3.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	36
3.6.3.3	Uji Hipotesis (Uji t) .....	36
3.6.3.4	Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F) .....	36
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
4.1	Statistik Deskriptif .....	38
4.2	Pemilihan Model .....	39
4.2.1	<i>Chow Test</i> .....	39
4.2.2	<i>Hausman Test</i> .....	40
4.3	Uji Asumsi Klasik .....	41
4.3.1	Uji Normalitas .....	41
4.3.2	Uji Multikolinearitas .....	42
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	43
4.3.4	Uji Autokorelasi .....	44
4.4	Analisis Hasil Regresi Data Panel .....	44
4.5	Pengujian Hipotesis .....	45
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	45
4.5.2	Uji Hipotesis (Uji t) .....	46
4.5.3	Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F) .....	47
4.6	Pembahasan .....	47
V.	SIMPULAN DAN SARAN .....	52
5.1	Simpulan .....	52
5.2	Implikasi .....	53
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	54

5.4 Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN .....	58

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 .....	3
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif .....	38
Tabel 4.2 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> .....	40
Tabel 4.3 Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i> .....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan <i>Glejser Test</i> .....	43
Tabel 4.6 <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi .....	45
Tabel 4.7 Tabel Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen BM.....	47

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian .....	22
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	42



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran:

1. Data Penelitian
2. Perkembangan Rata-rata Variabel Penelitian Selama Periode Pengamatan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan negara.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.

Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran, anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang

dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya. Tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan potensi. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Hidayat, 2013).

Menurut Mahmudi (2016), bagi pemerintah daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tulang punggung atau cetak biru pembangunan daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakukan distribusi, alokasi, dan stabilisasi keuangan di daerah. Oleh Karena itu, proses penyusunan APBD menjadi sangat penting bagi daerah, Karena arah dan orientasi pembangunan daerah dapat tergambar di dalam proses tersebut.

Porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal dicerminkan melalui sebuah rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan terselenggaranya pelayanan publik yang memadai. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen.

Dalam Laporan Deskripsi dan Analisis APBD yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2011-2015 menyatakan bahwa

Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi yang masih menganggarkan belanja modalnya dengan proporsi di bawah rata-rata persentase nasional. Hal ini berarti Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi yang masih belum memberikan perhatian yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Tabel 1.1 Data Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio	Rata-Rata Nasional
2011	2.038.550.822.907,17	10.485.384.637.685,00	19%	23%
2012	2.645.529.715.485,00	11.967.415.196.609,20	22%	23%
2013	3.044.371.811.333,69	13.519.611.381.041,00	23%	25%
2014	2.987.145.761.428,63	14.264.658.145.874,00	21%	26%
2015	3.581.513.097.804,24	16.030.060.591.798,00	22%	25%

Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD DJPK dan LHP BPK RI.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi suatu belanja daerah. Faktor-faktor seperti masalah politik, kondisi keuangan daerah, dan perilaku oportunistis dari para pemangku kebijakan dapat mempengaruhi alokasi suatu belanja (Hidayat, 2013). Meskipun demikian, faktor yang paling dapat diukur secara empiris adalah faktor yang terkait keuangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian belanja modal.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, *debt service coverage ratio*, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Hidayat, 2013). Alokasi belanja

modal pada pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi belanja modal serta kinerja keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) yang menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Martini dan Dwirandra (2015) yang melakukan penelitian di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, khususnya rasio ketergantungan, rasio efisiensi, tingkat pembiayaan SILPA, rasio efektivitas PAD, dan rasio kontribusi BUMD.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi**

## **Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung”.**

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur berdasarkan tingkat ketergantungan daerah, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah ukuran kinerja keuangan daerah yang diproksikan melalui tingkat ketergantungan daerah, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal berpengaruh pada alokasi belanja modal?
2. Manakah diantara empat variabel tersebut yang paling berpengaruh pada alokasi belanja modal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang diproksikan melalui tingkat ketergantungan daerah, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal, serta variabel yang paling berpengaruh pada alokasi belanja modal pemerintah daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:

## 1. Manfaat Teoritis

- Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.

- Bagi Akademisi

Untuk digunakan sebagai referensi dalam pengajaran maupun untuk dilakukan pengembangan dengan melakukan penelitian lebih lanjut terkait kinerja keuangan daerah dan pengalokasian belanja modal pemerintah daerah.

## 2. Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah

Untuk digunakan sebagai masukan atas kebijakan pengalokasian belanja modal berdasarkan kinerja keuangan daerah.

## 3. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk dijadikan bahan acuan atau referensi baik di Universitas Lampung maupun Pemerintah dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan kebijakan pengalokasian belanja modal pemerintah daerah secara umum, agar dapat membahas lebih dalam dan mengembangkan penelitian ini dalam lingkup yang lebih luas sehingga melengkapi kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kuantitatif-asosiatif yang berfokus pada pengaruh kinerja keuangan daerah pada kebijakan alokasi belanja modal pemerintah daerah.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi literatur, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan literatur, buku, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui membaca, mengumpulkan, dan mencatat serta menganalisisnya.

## **1.6 Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya menggunakan empat indikator, yaitu rasio ketergantungan daerah, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal. Data yang digunakan penulis diperoleh dari laporan keuangan periode 2011-2015 dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011-2015 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan arahan bagi para pembaca, sehingga penulisannya menjadi lebih selaras dan mudah dipahami. Sistematika penulisan juga menunjukkan urutan-urutan yang berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan untuk penelitian ini. Dalam pendahuluan akan dijelaskan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara garis besar untuk memberikan gambaran umum.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori dan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian. Teori dan penelitian terdahulu tersebut akan menjadi landasan berpikir dalam menentukan hipotesis penelitian. Landasan teori diperoleh dari berbagai sumber antara lain dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal pendukung dan sumber lain yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi, variabel penelitian, definisi operasional, dan model penelitian, serta pengujian-pengujian yang perlu dilakukan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data hasil penelitian dan pengolahan data penelitian. Selanjutnya, hasil-hasil tersebut akan diinterpretasikan.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan dan keterbatasan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Sularso dan Restianto, 2011). Inti dari sebuah pengukuran kinerja sangat sederhana, yaitu sebuah organisasi publik merumuskan target kinerja yang ingin dicapai dengan berbagai pertimbangan dan juga mengindikasikan bagaimana kinerja ini dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja (de Bruijn, 2002). Menurut Greiling (2005) yang mengutip *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), pengukuran kinerja merupakan alat yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dapat menyediakan data tentang bagaimana pelayanan publik diselenggarakan secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja sektor publik penting karena dampak potensialnya terhadap kinerja organisasi. Kinerja organisasi pemerintah yang baik berarti efektif dan efisiennya penyediaan barang publik serta pelayanan publik (Mimba dkk, 2007).

Namun begitu, lebih lanjut menurut de Bruijn (2002), kinerja organisasi pemerintah sulit untuk diukur kinerjanya. Hal ini dikarenakan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal yang dapat diukur kinerjanya adalah efek langsung berupa keluaran, contohnya berupa laporan jumlah sidang di pengadilan, jumlah laporan yang ditindaklanjuti oleh kepolisian, jumlah pasien yang ditangani dokter, dan sebagainya. Inilah mengapa banyak sistem pengukuran kinerja berfokus pada keluaran.

Rantanen dkk (2007) menyatakan bahwa penetapan target kinerja dalam organisasi pemerintah tidak sejelas dalam sektor privat. Dalam beberapa kasus, target utama dari suatu kegiatan seringkali tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan pengambil keputusan mengalami kesulitan untuk menentukan aspek-aspek penting mana yang akan diukur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah menyebutkan bahwa laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kinerja keuangan pada daerah dapat diukur dari berbagai analisis rasio keuangan. Analisis keuangan pada APBD dilakukan untuk membandingkan hasil yang dicapai pada suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Terdapat beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah antara lain sebagai berikut:

#### 2.1.1.1 Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah atau derajat desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Hidayat, 2013). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016).

#### 2.1.1.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah (Hidayat, 2013). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016).

#### 2.1.1.3 Rasio Efektivitas PAD

Adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari PAD harus diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah (Sianturi dkk, 2014).

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Hidayat, 2013). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2016).

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : < 75%

#### 2.1.1.4 Rasio Efisiensi

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD.

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Hidayat, 2013). Rasio efisiensi PAD dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD (Mahmudi, 2016).

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa semakin kecil nilai rasio efisiensi PAD maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efisien : < 10%
- Efisien : 10%-20%
- Cukup efisien : 21%-30%
- Kurang efisien : 31%-40%
- Tidak efisien : > 40%

#### 2.1.1.5 Rasio Kontribusi BUMD

Tingkat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi laba BUMD dalam mendukung pendapatan asli daerah. Semakin besar nilai rasionya maka semakin baik kinerja BUMD (Hidayat, 2013). Rasio kontribusi BUMD dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan PAD (Mahmudi, 2016).

#### 2.1.1.6 Debt Service Coverage Ratio

*Debt Service Coverage Ratio* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pinjamannya. DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR yang menjadi syarat bagi daerah untuk menarik pinjaman minimal 2,5 (Hidayat, 2013).

#### 2.1.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Dalam struktur APBD, terdapat penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Selisih antara penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran disebut surplus atau defisit. Struktur pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini disebut pembiayaan netto (Hidayat, 2013).

SILPA merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto. SILPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari defisit APBD (Hidayat, 2013).

#### 2.1.1.8 Ruang Fiskal

Ruang fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya (DJPK, 2011). Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat yaitu Belanja

Pegawai dan Belanja Bunga. Setelah itu, angka tersebut dibagi dengan total pendapatannya untuk mendapatkan rasio ruang fiskal (Hidayat, 2013).

### **2.1.2 Belanja Modal**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat diategorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu: (1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedung dan bangunan; (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; dan (5) belanja modal fisik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 53 (perubahan pertama dari Permendagri No. 13 Tahun 2006) menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Padovani dan Ferrante (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa indikator kinerja dirasa penting dalam pengalokasian anggaran bukan hanya karena indikator kinerja mewakili tujuan-tujuan yang ingin dicapai pimpinan



organisasi, tetapi juga karena harus dilakukan pengalokasian sumber daya dalam pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, sebuah sistem pengukuran kinerja harus dapat menghasilkan pengalokasian anggaran yang akurat dalam mengadaptasi anggaran tahunan tahun-tahun sebelumnya.

### **2.1.3 Teori Keagenan**

Hidayat (2013) mendefinisikan teori keagenan sebagai teori tentang suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara 2 pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen. Teori keagenan sering disebut sebagai teori prinsipal-agen. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang) (Halim dan Abdullah, 2006).

Menurut Lane dalam Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Bergman dan Lane dalam Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Moe dalam Halim dan

Abdullah, 2006). Ardhini dan Handayani (2011) menyatakan bahwa pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Ardhini dan Handayani, 2011).

#### **2.1.4 Teori Penganggaran**

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkret dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich dalam Abdullah, 2004). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya (Rubin dalam Abdullah, 2004).

Mardiasmo (2009) menyatakan pentingnya anggaran sektor publik karena beberapa alasan berikut:

1. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Budding dan Grossi (2015) menyatakan bahwa anggaran sangat berguna bagi kebutuhan perencanaan organisasi. Anggaran dapat membuat para politisi dan pimpinan perusahaan untuk berpikir ke depan dan untuk membuat keputusan tentang kinerja apa yang harus dicapai sekaligus menghabiskan sumber daya yang tersedia. Anggaran juga dapat dijadikan alat pengendalian dalam hal mengawasi penggunaan uang oleh manajer. Lebih lanjut lagi, anggaran juga dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang memungkinkan terjadinya komunikasi tentang tujuan dan prioritas organisasi. Terakhir, anggaran juga berguna untuk memotivasi para manajer, karena target yang sudah dianggarkan dan ditetapkan akan berhubungan dengan evaluasi kinerja nantinya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang terkait dengan pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut adalah:

- a. Penelitian Hidayat (2013) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dengan mengambil objek penelitian pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur periode tahun 2008-2012. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi tingkat ketergantungan, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat ketergantungan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan ruang fiskal berpengaruh positif signifikan.
- b. Penelitian Martini dan Dwirandra (2015) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dengan mengambil objek penelitian pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali periode tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan enam variabel bebas, yaitu rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan SILPA, rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi BUMD, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pembiayaan SILPA dan rasio efisiensi berpengaruh negatif signifikan, rasio ketergantungan dan rasio ruang fiskal berpengaruh positif signifikan, serta rasio efektivitas PAD dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan.
- c. Penelitian Sularso dan Restianto (2011) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dengan mengambil objek penelitian pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efektivitas pajak daerah,

dan derajat kontribusi BUMD. Variabel terikat dalam penelitian ini meliputi alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini adalah ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

- d. Penelitian Prihastuti dkk (2015) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dengan mengambil objek penelitian pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau periode 2009-2013. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas (rasio keserasian), derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan. Variabel terikat dalam penelitian ini meliputi alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini adalah rasio aktivitas (rasio keserasian) dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada pemilihan variabel bebas yang dipakai dan definisi operasional alokasi belanja modal. Kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penulis tidak menggunakan rasio kemandirian (derajat desentralisasi) sebagai variabel independen dengan pertimbangan bahwa rasio

ketergantungan bersifat dapat saling menggantikan (*trade off*) dengan rasio kemandirian karena memiliki sudut pandang yang sama (Hidayat, 2013), sehingga cukup dipilih salah satu saja. Rasio kontribusi BUMD juga tidak dipilih sebagai variabel independen dikarenakan kontribusi laba BUMD di Provinsi Lampung cenderung kecil, sehingga kemungkinan besar pengaruhnya tidak akan signifikan. Selain itu, tidak semua pemerintah kabupaten dan kota melakukan pinjaman pembiayaan untuk mengatasi defisit keuangan. Oleh karena itu, *debt service coverage ratio* (DSCR) juga tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

- b. Pada penelitian terdahulu tidak disebutkan secara jelas angka alokasi belanja modal yang digunakan berasal dari data APBD awal atau APBD Perubahan (APBDP). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan angka alokasi belanja modal yang berasal dari APBDP dengan pertimbangan kemutakhiran data dan karena data kinerja keuangan daerah tahun lalu baru dapat diketahui setelah tahun anggaran tersebut berakhir, sedangkan anggaran tahun berikutnya biasanya telah disahkan sebelum itu.

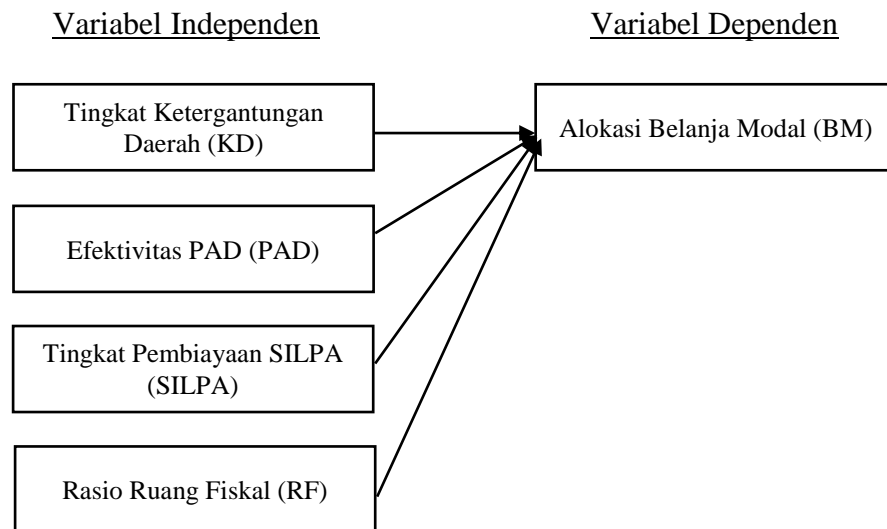
### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja modal dengan proporsi yang memadai. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan

luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi belanja daerahnya yang dapat diukur secara empiris adalah faktor yang terkait dengan keuangan daerah, salah satunya adalah melalui kinerja keuangan daerah. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah.

Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian



#### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang diproksikan melalui tingkat ketergantungan daerah, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal. Dari keempat ukuran kinerja keuangan daerah tersebut, nantinya akan diketahui ukuran kinerja keuangan daerah mana yang paling berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan hasil penelitian sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, ditentukan hipotesis sebagai berikut:

#### **2.4.1 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan teori dan berbagai penelitian terdahulu yang telah disebutkan, tingkat ketergantungan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011), dan penelitian Prihastuti dkk (2015). Tingkat ketergantungan daerah dinilai dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah karena semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal berupa pendapatan transfer, maka seharusnya belanja modal yang dianggarkan daerah tersebut tinggi.

H<sub>1</sub> : tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

#### **2.4.2 Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pada penelitian Hidayat (2013) dan penelitian Sularso dan Restianto (2011) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Sedangkan penelitian Martini dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Realisasi



PAD yang tinggi pada suatu daerah diharapkan dapat selaras dengan meningkatnya alokasi belanja modal di tahun anggaran berikutnya.

H<sub>2</sub> : Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

#### **2.4.3 Pengaruh Tingkat Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian Hidayat (2013), tingkat pembiayaan SILPA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Sedangkan pada penelitian Martini dan Dwirandra (2015), variabel ini memiliki pengaruh yang negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, SILPA merupakan indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena jika terjadi SILPA maka artinya daerah tersebut mempunyai penerimaan anggaran lebih besar dari pengeluarannya sekaligus penerimaan pembiayaannya lebih besar daripada pengeluaran pembiayaannya. Pemanfaatan dana SILPA yang masih besar pada akhir tahun dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan pengadaan tahun selanjutnya, termasuk belanja modal pemerintah.

H<sub>3</sub> : tingkat pembiayaan SILPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

#### **2.4.4 Pengaruh Rasio Ruang Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pada penelitian Hidayat (2013) dan penelitian Martini dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa rasio ruang fiskal memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah. Indikator ruang fiskal dapat mengetahui seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya

secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Semakin besar rasionya, berarti ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang didanai juga semakin besar.

H<sub>4</sub> : rasio ruang fiskal berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang berjumlah dua belas Pemerintah Kabupaten dan dua Pemerintah Kota. Pemerintah Kabupaten meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan. Pemerintah Kota meliputi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Periode yang dipilih dalam penelitian ini adalah lima tahun, yaitu tahun 2011-2015 agar terlihat adanya variasi dari alokasi belanja modal dan variabel kinerja keuangan yang diduga mempengaruhinya. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung dipilih dengan alasan selama periode 2011-2015 proporsi rasio belanja modal terhadap total belanja di Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata persentase nasional.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diambil dengan metode dokumentasi. Data penelitian ini bersumber dari dokumen APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Selain itu, data penelitian juga bersumber dari data keuangan yang diperoleh dengan cara diunduh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

### **3.3 Sampel Penelitian**

Sampel penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung mulai periode 2011 sampai dengan 2015. Berdasarkan data yang tersedia, kabupaten dan kota di Provinsi Lampung berjumlah dua belas Pemerintah Kabupaten dan dua Pemerintah Kota, sehingga data yang digunakan berjumlah empat belas kabupaten dan kota (14n) serta lima periode tahun (5t).

### **3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

Variabel independen (x) : Tingkat ketergantungan daerah ( $x_1$ )  
Efektivitas PAD ( $x_2$ )  
Tingkat Pembiayaan SILPA ( $x_3$ )  
Rasio Ruang Fiskal ( $x_4$ )  
Variabel dependen (y) : Alokasi Belanja Modal

#### **3.4.1 Alokasi belanja modal.**

Alokasi belanja modal adalah alokasi belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pada tahun 2011-2015 pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Alokasi belanja modal pada penelitian ini merupakan hasil pembagian angka belanja modal perubahan terhadap total belanja perubahan yang terdapat pada APBD. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian

sebelumnya yang masih menggunakan angka belanja modal awal dan angka total belanja awal.

#### 3.4.2 Tingkat ketergantungan daerah.

Tingkat ketergantungan daerah adalah perbandingan jumlah pendapatan transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta Transfer Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi, yang diperoleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung selama tahun 2010-2014 terhadap total pendapatan daerah tahun 2010-2014. Tata cara perhitungan variabel ini merujuk pada penelitian Hidayat (2013) dan Martini (2015). Penelitian ini menggunakan angka tingkat ketergantungan daerah tahun sebelumnya (t-1) untuk alokasi belanja modal tahun berjalan (t).

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 3.4.3 Efektivitas PAD.

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi PAD yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014 terhadap target PAD yang telah ditetapkan. Tata cara perhitungan variabel ini merujuk pada penelitian Hidayat (2013) serta Sularso dan Restianto (2011). Penelitian ini menggunakan angka efektivitas PAD tahun sebelumnya (t-1) untuk alokasi belanja modal tahun berjalan (t).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

#### 3.4.4 Tingkat pembiayaan SILPA.

Tingkat pembiayaan SILPA merupakan rasio yang dihitung dengan membandingkan antara anggaran SILPA yang terdapat pada dokumen penganggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014 dengan total belanja 2010-2014. Perhitungan variabel ini merujuk pada penelitian Hidayat (2013). Untuk alokasi belanja modal tahun t digunakan SILPA tahun t-2 (atau angka SILPA pada anggaran, dan bukan realisasi penggunaan SILPA) dan total belanja tahun t-1.

$$\text{Tingkat Pembiayaan SILPA} = \frac{\text{SILPA}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### 3.4.5 Rasio ruang fiskal.

Rasio ruang fiskal dihitung dengan membandingkan pendapatan yang telah dikurangkan dengan DAK, Dana Otsus/Penyesuaian, Dana Darurat, Hibah, Belanja Pegawai dan Belanja Bunga 2010-2014 terhadap total pendapatan daerah tahun 2010-2014. Perhitungan ini merujuk pada penelitian Hidayat (2013). Untuk alokasi belanja modal tahun berjalan (t) digunakan data rasio ruang fiskal tahun yang lalu (t-1).

$$\text{Ruang Fiskal} = \text{Pendapatan} - \text{DAK} - \text{Dana Penyesuaian} - \text{Dana Darurat} \\ - \text{Hibah} - \text{Belanja Pegawai} - \text{Belanja Bunga}$$

$$\text{Rasio Ruang Fiskal} = \frac{\text{Ruang Fiskal}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 3.5 Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis dan variabel penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuat model penelitian berbentuk regresi berikut ini:

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y	=	alokasi belanja modal pemerintah daerah i pada tahun t;
$\alpha$	=	konstanta atau <i>intercept</i> ;
X <sub>1</sub>	=	tingkat ketergantungan daerah pemerintah daerah i pada tahun t;
X <sub>2</sub>	=	efektivitas PAD pemerintah daerah i pada tahun t;
X <sub>3</sub>	=	tingkat pembiayaan SILPA pemerintah daerah i pada tahun t;
X <sub>4</sub>	=	rasio ruang fiskal pemerintah daerah i pada tahun t;
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=	koefisien regresi, merupakan angka koefisien elastisitas;
$\varepsilon_{it}$	=	kesalahan pengganggu pada pemerintah daerah i pada tahun t.

### 3.6 Pengujian Persyaratan Pengolahan Data

#### 3.6.1 Pemilihan model regresi.

Penelitian ini menggunakan data gabungan antara data *time series* dan *cross section*, atau yang biasa disebut dengan data panel. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *Ordinary Least Square (OLS)*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

##### 3.6.1.1 *Ordinary Least Square (OLS)*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

### 3.6.1.2 *Fixed Effect Model*

Model ini didasari adanya kemungkinan *intercept* yang tidak konstan sebagai akibat tidak semua variabel dimasukkan dalam persamaan model. Dengan kata lain, *intercept* mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Untuk memungkinkan perubahan *intercept* untuk setiap individu dan waktu maka dilakukan generalisasi dengan menambahkan *variabel dummy* sebanyak jumlah individu dikurangi satu.

### 3.6.1.3 *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas.

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

### 3.6.1.4 *Chow test* (uji Chow).

Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara model OLS dan model *fixed effect* (model efek tetap). Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model menggunakan model OLS;

$H_1$ : Model menggunakan model *fixed effect*.

$H_0$  ditolak jika  $\text{Prob}>F$  lebih kecil dari  $\alpha$ .



#### 3.6.1.5 *Hausman test* (uji Hausman)

Pengujian ini dilakukan untuk memilih antara model *fixed effect* (model efek tetap) atau model *random effect* (model efek random). Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model menggunakan model *random effect*;

$H_1$ : Model menggunakan model *fixed effect*.

$H_0$  ditolak jika  $\text{Prob} > \chi^2$  lebih kecil dari  $\alpha$ .

#### 3.6.1.6 Uji *Lagrange Multiplier*.

Pengujian ini dilakukan untuk memilih antara model OLS dan model *random effect* (model efek random). Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model menggunakan model OLS;

$H_1$ : Model menggunakan model *random effect*.

$H_0$  ditolak jika  $\text{Prob} > \chi^2$  lebih kecil dari  $\alpha$ .

### 3.6.2 Uji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil dari model yang diuji tidak menjadi bias. Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 3.6.2.1 Uji normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual

mengikuti distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik maupun analisis statistik. Untuk menghindari subjektivitas analisis grafik maka penelitian ini akan menggunakan analisis statistik. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai  $Prob>z$  lebih besar daripada  $\alpha$  (0,05) maka disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi telah terdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai  $Prob>z$  lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi terdistribusi tidak normal.

#### 3.6.2.2 Uji multikolinearitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Multikolinearitas muncul jika di antara variabel independen memiliki korelasi yang tinggi sehingga sulit untuk memisahkan efek suatu variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Hal ini disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan variabel pasangannya karena korelasi yang tinggi. Model penelitian yang baik memiliki nilai multikolinearitas yang rendah karena apabila multikolinearitasnya tinggi maka model yang dipakai tidak bisa memisahkan efek parsial dari satu variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya.

Beberapa indikator dalam mendeteksi adanya multikolinearitas, diantaranya (Gujarati dan Porter, 2009):

1. Nilai  $R^2$  yang terlampau tinggi, (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada atau sedikit *t-statistic* yang signifikan.
2. Nilai *F-statistic* yang signifikan, namun *t-statistic* dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan.

Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80 maka terdapat multikolinearitas (Gujarati dan Porter, 2009).

#### 3.6.2.3 Uji heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Sedangkan homoskedastisitas berarti semua varian variabel gangguan memiliki varian yang konstan. Salah satu metode *Ordinary Least Squares* (OLS) adalah bahwa varian variabel gangguan sama atau homoskedastisitas. Konsekuensi apabila estimator OLS terdapat masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan metode OLS tidak lagi mempunyai varian yang minimum atau dengan kata lain tidak lagi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Jika nilai  $\text{Prob} > \chi^2$  lebih kecil dari  $\alpha$  maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika  $\text{Prob} > \chi^2$  lebih besar dari  $\alpha$  maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Gujarati dan Porter (2009), terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas, antara lain *Park test*, *Glejser test*, *Spearman's rank correlation test*, *Goldfeld-Quandt test*, *Breusch-Pagan-Godfrey test*, dan *White's general heteroscedasticity test*.

#### 3.6.2.4 Uji autokorelasi.

Model regresi dikatakan baik apabila *error* atau residual antar observasi tidak saling berkorelasi. Apabila *error* atau residual antar observasi saling berkorelasi maka telah terjadi autokorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada data *time series* karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Apabila nilai probability atau Prob>F lebih kecil dari  $\alpha$  maka telah terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai *probability* atau Prob>F lebih besar dari  $\alpha$  maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji autokorelasi antara lain *Durbin-Watson Test*, *Langrange Multiplier (LM Test)*, dan Metode *Breusch-Godfrey*.

### 3.6.3 Pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis yang dilakukan meliputi analisis regresi, Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), Uji signifikansi parameter individual (Uji t), dan Uji simultan (Uji F).

#### 3.5.3.1 Analisis regresi.

Analisis regresi merupakan studi yang menganalisis ketergantungan variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel yang diketahui. Untuk mendapatkan persamaan regresi dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pemilihan model regresi yang akan

digunakan, yakni OLS, *fixed effect model* (model efek tetap), atau *random effect model* (model efek random).

#### 3.5.3.2 Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati dan Porter, 2009). Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### 3.5.3.3 Uji hipotesis (Uji t).

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

#### 3.5.3.4 Uji kelayakan model regresi (Uji F).

Uji F digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menunjukkan bahwa

model yang digunakan dalam penelitian telah layak untuk dilanjutkan pengujian selanjutnya. Uji F juga digunakan untuk menguji ketepatan model atau *goodness of fit*, yakni apakah model regresi yang dibentuk memenuhi kriteria cocok (*fit*) atau tidak. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kinerja keuangan daerah yang diproksikan melalui tingkat ketergantungan daerah, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung dalam periode 2011-2015. Berdasarkan hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat ketergantungan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah negatif.
- b. Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung belum sepenuhnya mengalokasikan pendapatan daerah yang berasal dari PAD untuk membiayai belanja modal daerah, dan juga karena tingkat ketergantungan daerah yang masih tinggi sehingga belanja modal daerah hanya dibiayai dari dana perimbangan yang diterima dari pihak ketiga.
- c. Tingkat pembiayaan SILPA memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah positif.
- d. Rasio ruang fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten/kota masih

mengalokasikan sebagian besar dana/pendapatan yang bebas dan tersedia untuk belanja operasional, sehingga belanja modal relatif masih kecil.

## **5.2 Implikasi**

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap peningkatan pengalokasian belanja modal daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

### **a. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berupa tingkat ketergantungan daerah (TKD), efektivitas PAD (PAD), tingkat pembiayaan SILPA (SILPA), dan rasio ruang fiskal (FISKAL) secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hidayat (2013) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah. Namun pengaruh ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pemerintah daerah. Pengaruh positif atau negatif terhadap alokasi belanja modal daerah, salah satunya ditentukan oleh seberapa efektif kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah untuk mendapatkan penerimaan yang besar dan mengalokasikannya untuk porsi belanja modal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.



## b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada kebijakan khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk meningkatkan alokasi belanja modal dalam anggaran belanja daerahnya sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat. Hal ini nantinya akan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga diharapkan daerah akan semakin mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung kepada bantuan dari pusat. Alokasi belanja modal yang ditingkatkan tentunya akan juga meningkatkan jumlah pembangunan infrastruktur sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Juga peran aparat pengawasan pemerintah daerah (BPKP dan Inspektorat) diharapkan dapat mengawasi proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran hingga selesai direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sehingga dana yang nantinya dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan daerah, terhindar dari penyalahgunaan, dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Variabel independen tingkat ketergantungan daerah (TKD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah negatif. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal

berupa pendapatan transfer, maka seharusnya belanja modal yang dianggarkan daerah tersebut tinggi.

2. Penelitian ini hanya mendasarkan pada informasi berupa angka yang terdapat pada laporan realisasi anggaran (LRA) dan dokumen pelaksanaan APBD sehingga mengabaikan aspek diluar data tersebut, seperti prioritas belanja daerah dan kebijakan politis penyusunan anggaran daerah.
3. Kinerja keuangan daerah sebagai variabel independen pada penelitian ini hanya berupa tingkat keergantungan daerah, efektivitas PAD, tingkat pembiayaan SILPA, dan rasio ruang fiskal.
4. Objek penelitian terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan rentang waktu hanya 5 tahun.

#### **5.4 Saran**

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, berikut adalah saran yang dapat diberikan.

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah, serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.
2. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan penggunaan data sekunder yang lebih besar serta rentang waktu pengamatan yang lebih lama sehingga dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., dan Asmara, J. A. (2004). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik.
- Ardhini, A., dan Handayani, S. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan.
- Budding, T., Grossi, G., dan Tagesson, T. (2015). *Public Sector Accounting*. London: Routledge.
- de Bruijn, H. (2002). Performance Measurement in the Public Sector: Strategies to Cope with the Risks of Performance Measurement. *Emerald Insight 15*, 578-593.
- DJPk. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Greiling, D. (2005). Performance Measurement in the Public Sector: The German Experience. *Emerald Insight 54*, 551-565.
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Halim, A., dan Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi.
- Hidayat, M. F. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martini, K., dan Dwirandra, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 426-443.
- Mimba, N. P., van Helden, G., dan Tillema, S. (2007). Public Sector Performance Measurement in Developing Countries: A Literature Review and Research Agenda. *Emerald Insight 3*, 193-195.
- Padovani, E., dan Ferrante, M. R. (2006). The Impact of Performance Measurement on Financial Forecasting in Italian Municipalities. *Public Budgeting & Finance*, 8-9.

- Prihastuti, A. H., Taufik, T., dan Agusti, R. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *LPPM Universitas Riau*, 148-153.
- Rantanen, H., Kulmala, H., Lönnqvist, A., dan Kujansivu, P. (2007). Performance Measurement Systems in the Finnish Public Sector. *Emerald Insight* 20, 418-419.
- Sianturi, A., Sjamsuddin, S., dan Domai, T. (2014). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 557.
- Sularso, H., dan Restianto, Y. M. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.